

# Apakah Pariwisata Mempengaruhi Ketimpangan? Bukti dari Daerah Istimewa Yogyakarta

Muhammad Dzaky\*, Akbar Bagus Nugroho

Program Studi Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada  
mdzaky521@mail.ugm.ac.id

## Abstract

*It was initially believed that tourism was a sector capable of reducing global inequality in numerous academic and practical discussions. Nevertheless, in the years that followed, a number of academics and scholars began to question the efficacy of tourism as a means of reducing regional inequality. Therefore, the objective of this study is to determine whether tourism has the potential to alleviate or exacerbate inequality in a given region. The Yogyakarta Special Region Province serves as the focal point of this study. This study employs secondary data that is publicly accessible through the DIY Tourism Statistics page and the National Planning Agency (Bappenas). Income inequality, as denoted by the GINI index, serves as the dependent variable in this inquiry. The GINI index is a numerical value between 0 and 1, with 0 indicating an equal income distribution and 1 indicating ideal income inequality. The independent variable in this study is government revenue from the tourism sector (PP). This research indicates that the income of the tourism industry to the DIY government exacerbates the income distribution in DIY, particularly in the GINI index corridor.*

**Keywords:** *Tourism, inequality, Gini index, econometric*

## Pendahuluan

### Pariwisata dan Pengentasan Ketimpangan

Terdapat perdebatan oleh banyak ahli ekonomi pariwisata, tentang bagaimana dampak pariwisata terhadap ketimpangan, khususnya di negara-negara berkembang (Ghosh & Mitra, 2021; Kyara, 2021; Zhang & Yang, 2023) hal ini sejalan dengan berkembangnya pariwisata secara masif. Ketimpangan menjadi semakin nyata dan demikian pula kebutuhan akan pemahaman yang lebih kompleks dan berbeda mengenai ketimpangan tersebut. Studi pariwisata yang ada telah berupaya memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hubungan antara pariwisata internasional dan ketimpangan pendapatan. Scheyvens (2007) berpendapat bahwa pariwisata membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam perspektif lain, manfaat pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi juga masih diperdebatkan. Hal ini karena kebijakan pariwisata yang netral dapat memberikan hasil ekonomi yang netral. Yang et. al, 2017 lebih lanjut berpendapat bahwa untuk menjamin pariwisata yang berpihak pada masyarakat miskin, pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang tidak proporsional kepada masyarakat miskin untuk mengurangi

ketimpangan pendapatan. Hal ini untuk menjamin bahwa masyarakat miskin memperoleh distribusi lebih banyak dibandingkan mereka yang telah mapan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ini diperlukan institusi yang kuat untuk mengatur industri pariwisata dan mendistribusikan aset untuk memfasilitasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat miskin.

Namun, Schilcher (2007) juga berpendapat bahwa strategi peningkatan kesejahteraan mungkin tidak dapat jika hanya melalui pengalihan manfaat kepada masyarakat miskin. Hal ini karena bias neoliberal dan corak ekonomi kapitalis yang telah mengakar dalam praktik ekonomi global dewasa ini. Sebaliknya, strategi regulasi industri atau insentif pemerintah mempunyai potensi lebih baik untuk diterapkan dalam skala besar. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata dapat membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan mereka. Maka, kemungkinan besar pariwisata dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, jika peluang kerja yang terkait dengan pariwisata sebagian besar berpusat pada pekerjaan berupah rendah atau kontrak tanpa jam kerja, maka sektor pariwisata mungkin akan mengalami hal tersebut memang memperburuk ketimpangan pendapatan.

Perdebatan mengenai pariwisata sebagai alat pengentasan ketimpangan, tidak hanya melalui investigasi mengenai bagaimana dan mengapa pariwisata berkontribusi terhadap dan mencerminkan ketimpangan pendapatan. Akan tetapi, juga melalui proses eksplorasi mengenai bagaimana pariwisata dapat menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan pendapatan atau mengurangi dampak dari ketimpangan. Namun baru-baru ini, penekanan pada manfaat ekonomi telah coba dikaji dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai sifat pembangunan ekonomi yang tidak merata. Hal ini ditambah permasalahan serius mengenai kelestarian lingkungan dari industri pariwisata dan kegelisahan terhadap dampak negatif pariwisata terhadap sosial dan budaya (Cole & Morgan, 2011).

Dalam beberapa studi yang telah dipelajari, sejatinya tidak terdapat kesimpulan final yang menyatakan bahwa pariwisata merupakan “obat” bagi pengentasan ketimpangan (Lee, 2009; Cole & Morgan, 2010; Raza & Shah, 2017; Ghosh & Mitra, 2021; Massil, et al, 2021; Kyara et.al, 2021; Subramaniam, 2022). Para akademisi pariwisata khususnya yang menaruh minat pada kajian ekonomi dan pengembangan wilayah cenderung tidak sepakat ketika berbicara mengenai pariwisata dan ketimpangan. Studi dari Kyara et al, 2021 menemukan bahwa pariwisata dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara berpendapatan rendah. Akan tetapi penelitian tersebut menekankan jika hal ini dibarengi dengan kebijakan distribusi pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Negara-negara seperti Tanzania, misalnya, memperoleh 17% PDB-nya dari sektor pariwisata (Kyara, 2021). Hal ini memungkinkan negara tersebut untuk meningkatkan belanja kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur secara signifikan.

Meskipun demikian, dalam beberapa dekade belakangan, pariwisata internasional telah digunakan sebagai alat kebijakan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan akhir

untuk meningkatkan standar hidup seluruh penduduk lokal. Hal ini diasumsikan dapat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan di negara-negara kurang berkembang karena mendorong peningkatan infrastruktur dasar dan mempercepat akumulasi sumber daya manusia. Selain itu, pariwisata dipandang dapat merangsang terjadinya diversifikasi ekonomi dan memicu perubahan struktural dan tertiarisasi (misalnya, Deller, 2010; Li et al., 2016). Pandangan tersebut senada dengan pendapat Shaw dan Williams (2004) bahwa pariwisata mampu mendistribusikan pembangunan dari pusat ekonomi ke daerah tertinggal. Dengan demikian, pengembangan pariwisata cenderung dijadikan instrumen untuk mempersempit ketimpangan.

Secara praktikal, dalam level kebijakan pariwisata telah di harus utamakan sebagai obat bagi pengentasan ketimpangan. Pemerintahan dari berbagai level telah menjadikan pariwisata sebagai *agenda setting* untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Organisasi-organisasi dunia seperti United Nations World Tourism Organization (UNWTO) hingga International Labour Organization (ILO) acapkali mengampanyekan pariwisata sebagai alat pengentasan ketimpangan dan kemiskinan sebagai target pembangunan pariwisata 2030. Hal yang sama juga dikampanyekan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu *agenda setting* untuk mengurangi ketimpangan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 UU no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai berikut:

*Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.*

Melalui kutipan tersebut nampak bahwa pemerintah mengamini marwah dari pariwisata ada pada aspek ekonomi. Hal ini semakin diperkuat dengan tujuan pembangunan kepariwisataan dalam pasal 4 beberapa diantaranya: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; c) menghapus kemiskinan; d) mengatasi pengangguran. Keempat aspek tersebut pada dasarnya merupakan instrumen yang berpengaruh terhadap aspek ketimpangan di sebuah negara yakni pengangguran, pendapatan, pendidikan (Cole & Morgan, 2011). Oleh karena itu, proses pengarusutamaan pariwisata sebagai instrumen baru untuk mengatasi ketimpangan benar dimaknai secara substansial dalam level kebijakan. Meskipun hingga hari ini belum ada konsensus diantara para akademisi hingga praktisi pariwisata terkait signifikansi pariwisata sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan. Akan tetapi, sampai hari ini kebijakan pariwisata telah terlanjur diutamakan secara masif sebagai alat pengentasan ketimpangan.

### Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam konteks Indonesia, salah satu daerah yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu tumpuan perekonomian regional adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Melalui branding #Jogjalstimewa, DIY berkembang menjadi salah satu region yang memiliki tingkat kunjungan Wisatawan Nusantara tertinggi ketiga di Indonesia. Pada tahun 2023, DIY mencatatkan total 27 juta kunjungan Wisatawan Nusantara pada tahun 2023 (BPS, 2024). Jumlah tersebut hanya kalah

dari Jawa Timur yang mencatatkan 187 juta kunjungan dan Jawa Tengah yang mencatatkan 103 juta kunjungan Wisatawan Nusantara. Selain jumlah wisatawan perkembangan DIY sebagai kawasan tujuan wisata juga ditunjang oleh perkembangan Daya Tarik Wisata (DTW) dan akomodasi wisata yang ada di DIY.

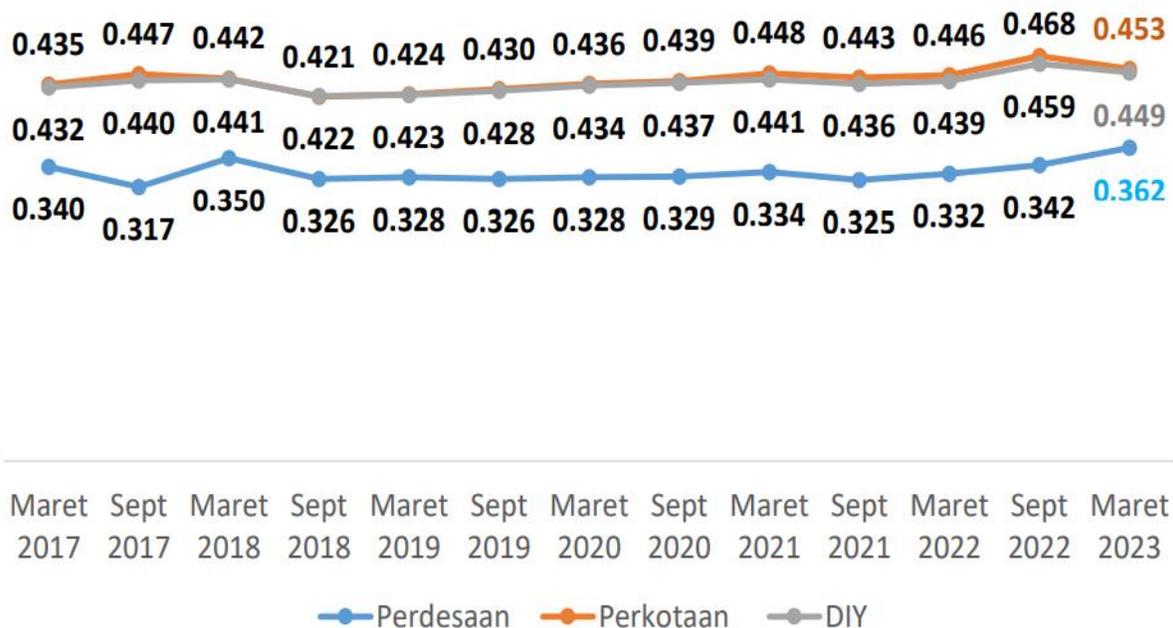
Berdasarkan data Statistik kepariwisataan DIY, Jenis DTW yang paling mendominasi adalah desa wisata dengan jumlah 148. Sementara DTW lain, seperti museum memiliki jumlah 39, wisata alam sebanyak 49, wisata marina sebanyak 45, wisata sejarah sebanyak 24, dan wisata tirta sebanyak 14. Sementara itu, terkait akomodasi hotel, Provinsi DIY mencatatkan jumlah akomodasi sebanyak 1.735 akomodasi hotel, dengan rincian 168 hotel berbintang dan 1.567 hotel non bintang. Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan jumlah akomodasi hotel terbanyak di DIY dengan 613 hotel, kemudian disusul Kota Yogyakarta dengan 595 hotel, Bantul dengan 345 hotel, Gunung Kidul dengan 145 hotel, dan Kulon Progo dengan 37 hotel.

Keberadaan DTW dan akomodasi wisata menjadi salah satu faktor yang menentukan bagi wisatawan untuk berkunjung di suatu kawasan. Melalui kunjungan wisata, sebuah kawasan akan mendapatkan pendapatan melalui uang yang dikeluarkan wisatawan. Berdasarkan data dari BPS DIY (2024), rata-rata lama tinggal wisatawan di DIY adalah 1,76 hari, dengan rincian wisatawan mancanegara selama 2,18 hari dan wisatawan nusantara selama 1,35 hari. Selain itu, rata-rata uang yang dikeluarkan wisatawan mancanegara adalah 672 dollar atau setara dengan 10 juta rupiah dan wisatawan nusantara sebesar 2,2 juta rupiah. Sektor pariwisata DIY mampu mengemulsikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 2,4 triliun rupiah dari lima kabupaten/kota di DIY (Jogjaprov.id).

### Ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Meskipun kita telah melihat bagaimana pentingnya peran sektor pariwisata di DIY dalam hal peningkatan perekonomian regional. Akan tetapi, Provinsi DIY justru menjadi kawasan termiskin di Indonesia dan kawasan dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia (BPS, 2024). Apabila dilihat secara makro, Indonesia secara umum memiliki rasio Gini yang rendah yakni hanya 0,388 (di bawah 0,4 merupakan ketimpangan rendah). Akan tetapi, masih ditemukan beberapa daerah yang memiliki rasio gini yang relatif tinggi, salah satunya adalah Provinsi DIY. Provinsi DIY merupakan provinsi yang memiliki rasio gini tertinggi diantara 35 provinsi di Indonesia, yaitu sebesar 0,449. Rata-rata rasio Gini di Provinsi DIY antara tahun 2010 hingga 2023 selalu lebih tinggi dari 0,4 (kategori sedang), jumlah tersebut secara konsisten melampaui tingkat ketimpangan nasional (BPS, 2023). Apabila dilihat secara mikro, berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi DIY Tahun 2023. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan tertinggi yakni 0,454. Kemudian secara berturut-turut disusul oleh Sleman (0,433), Kulonprogo (0,402), dan Gunungkidul (0,343). Akan tetapi, hal tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh pariwisata saja. Terdapat beberapa faktor seperti, kondisi DIY yang merupakan kawasan dengan banyak pendatang yang turut memperbesar indeks ketimpangan.

Tingginya ketimpangan tersebut juga turut diperkuat dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023. Selama periode Maret 2017 sampai dengan Maret 2023, angka rasio gini D.I. Yogyakarta berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat (BPS DIY, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pendapatan di DIY masih belum menunjukkan perbaikan. Meskipun sempat mengalami penurunan tingkat ketimpangan pendapatan pada September 2018, namun tingkat ketimpangan wilayah DIY terus menunjukkan adanya peningkatan sejak Maret 2019. Hal ini diperparah dengan wabah COVID-19, angka rasio gini DIY menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 0,005 poin per semester (lihat gambar 1). Pada Maret 2023, angka gini rasio di wilayah ini mulai menunjukkan adanya penurunan, hingga rasio gini tercatat sebesar 0,449. Akan tetapi, rasio ketimpangan tersebut masih tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia.



Gambar 1. Rasio Ketimpangan di DIY 2017-2023  
(Sumber: Berita Resmi Statistik 2023)

ukuran lain yang dapat menggambarkan ketimpangan pendapatan selain rasio gini adalah distribusi pengeluaran antar penduduk di suatu kawasan (World Bank, 2017). Ukuran yang sering digunakan adalah dengan cara mengukur persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah. Tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori: ketimpangan rendah, jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah kurang dari 12 persen. Ketimpangan sedang, jika persentasenya antara 12 dan 17 persen. Sementara itu, suatu daerah disebut memiliki ketimpangan tinggi jika persentasenya di atas 17%.

Di perkotaan DIY misalnya, 40% penduduk termiskin hanya berkontribusi hingga 15,21% dari total konsumsi yang dilakukan di DIY. Dibandingkan dengan September 2022 yang hanya mencatatkan 14,91%, konsumsi kelompok ini mengalami peningkatan sebesar 0,3%. Akan tetapi, jika dibandingkan selama satu tahun terakhir, proporsi konsumsi kelompok penduduk ini masih belum menunjukkan adanya peningkatan. Berbanding terbalik dengan kondisi perdesaan DIY, Pada September 2022, kelompok “40 persen pengeluaran terbawah” perdesaan melakukan konsumsi sebesar 20,42 persen dari total pengeluaran. Akan tetapi pada Maret 2023, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,66% menjadi 19,76%. Jumlah ini berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi masyarakat dengan 20 persen pengeluaran tertinggi Maret 2023 yang mencapai 53,36 persen di perkotaan dan 45,65 persen di pedesaan. Oleh karena itu, jika merujuk pada patokan Bank Dunia, indeks ketimpangan DIY berdasarkan sebaran pengeluaran ada pada tingkat yang relatif tinggi (BPS, 2023).

## Kajian Literatur

### Perkembangan Pariwisata dan Ketimpangan Pendapatan

Kontribusi pariwisata membuat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan telah diselidiki dalam berbagai penelitian (Akkemik, 2012). Akan tetapi bagaimana pertumbuhan dan pembangunan yang disebabkan oleh pariwisata dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan? Selain itu, pengurangan ketimpangan pendapatan melalui pariwisata juga belum sepenuhnya dinilai (Kinyondo & Pelizzo, 2015). Oleh karena itu, studi ini berupaya memperluas literatur yang meneliti hubungan antara pariwisata dan ketimpangan pendapatan. Jika ditilik dari perspektif teoretis, pengembangan pariwisata ditemukan mempengaruhi ketimpangan pendapatan, dan hasil ekonomi dari kegiatan pariwisata dapat mengurangi atau meningkatkan ketidaksetaraan melalui saluran yang berbeda (Njoya dan Seetaram, 2018). Pengaturan di mana kelompok yang kurang beruntung mendapat manfaat relatif lebih banyak dari kegiatan pariwisata dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan (Blake, 2008).

Pengangguran seringkali menjadi faktor memperburuk ketimpangan pendapatan karena keduanya mewakili kehilangan pendapatan langsung dan menghilangkan cara seseorang dalam memperoleh pendapatan (Helpman, Itskhoki, & Redding, 2010). Sektor pariwisata terutama mengurangi ketimpangan pendapatan melalui penciptaan peluang kerja baru, karena lebih banyak tenaga kerja diperlukan jika investasi dan layanan pariwisata meningkat (Garsous, Cordderi, Velasco, & Colombo, 2017). Akan tetapi, meski jelas meningkatkan kegiatan ekonomi, manfaat ekonomi dari pariwisata belum tentu terdistribusi secara merata sehingga mengarah pada ketimpangan pendapatan lebih lanjut.

Misalnya, Studi Carrascal Incera & Fernandez, (2015) tentang rumah tangga berpenghasilan tinggi di kawasan wisata Galicia, Spanyol. Melalui model Social Accounting Matrices, kelompok berpenghasilan tinggi justru mendapat manfaat lebih banyak dari pariwisata masuk, daripada rumah tangga berpenghasilan rendah. Hubungan tipe Kuznets antara pariwisata dan ketimpangan pendapatan juga telah diidentifikasi dalam beberapa studi (Ghosh, 2021; Subramaniam, 2022).

Pariwisata dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan pada tahap awal pengembangan, tetapi secara signifikan mengurangi ketimpangan pada tahap selanjutnya (Alam & Paramati, 2016). Akan tetapi hal tersebut sangat tergantung pada fase, ekonomi makro, dan tingkat intervensi pemerintah. Studi yang lebih baru menghubungkan hubungan antara pariwisata dan ketimpangan pendapatan dengan kualitas kelembagaan negara dan menunjukkan kompleksitas hubungan berdasarkan berbagai tingkat pendapatan (Nguyen, Schinckus, Su, & Chong, 2021).

#### Analisis Ekonomi Hubungan Pariwisata dan Ketimpangan

Efek pertumbuhan pariwisata pada ketimpangan pendapatan telah diselidiki menggunakan berbagai metode empiris dalam ekonomi pariwisata. Metode tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok. Kelompok pertama menerapkan ekonometrik seri-waktu, seperti kointegrasi dan tes kausalitas Granger untuk mengidentifikasi hubungan antara pengembangan pariwisata dan berbagai ukuran ketidaksetaraan. Sebagai contoh, Croes dan Vanegas (2008) menganalisis hubungan yang stabil, dan kausalitas Granger di antara pengembangan pariwisata, ekspansi ekonomi, dan pengurangan kemiskinan di Nikaragua. Penelitian tersebut menyarankan bahwa intervensi publik dan swasta diperlukan dalam strategi pengembangan ekspansi pariwisata secara berkelanjutan. Namun, salah satu kelemahan dari analisis kausalitas Granger adalah karena merupakan metode ateoritis berdasarkan *temporal ordering* (Hoover, 2017).

Studi dalam kelompok kedua menggunakan pemodelan ekonometrik data panel untuk melihat hubungan antara pariwisata dan ketimpangan. Studi Lee dan O'Leary (2008) berfokus pada keadilan ekonomi dalam masyarakat yang bergantung pada pariwisata dan rekreasi untuk menilai bagaimana pariwisata dan pengembangan rekreasi berkontribusi pada kesetaraan ekonomi di komunitas tertentu di AS. Komunitas-komunitas tersebut merupakan tiga komunitas non-metropolitan yang bergantung pada pariwisata dan rekreasi, manufaktur, dan pertanian. Hasilnya, mereka menemukan bahwa pembangunan berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan, tidak seperti pembangunan di sektor manufaktur, yang justru mampu mengurangi ketimpangan (Lee & O'Leary, 2008). Studi lainnya dari Kim et al. (2016) menggunakan data panel dari 69 negara dan menemukan bahwa pengeluaran pariwisata memiliki efek yang tidak signifikan pada pengurangan ketimpangan secara umum. Akan tetapi, efek nyata pariwisata pada rasio ketimpangan juga tergantung pada perkembangan ekonomi suatu negara.

Studi dalam kelompok ketiga menerapkan Social Accounting Matrices (SAM), yang menangkap berbagai efek distribusi pariwisata melalui hubungan *backward and forward* dari kegiatan pariwisata dengan seluruh ekonomi (Carrascal Incera & Fernandez, 2015). Blake (2008), misalnya, meneliti efek dari industri terkait pariwisata dan industri ekspor lainnya pada rumah tangga di Afrika Timur dan menemukan bahwa pariwisata memberikan pendapatan yang jauh lebih sedikit untuk rumah tangga yang lebih miskin daripada industri ekspor. Hal ini mengarah pada kekhawatiran bahwa ekspansi pariwisata mungkin tidak membantu mengurangi kemiskinan di negara-negara ini. Saayman et al. (2012) mengkonfirmasi temuan Blake (2008) dalam konteks Afrika Selatan, menemukan bahwa dampak negatif yang sedikit dalam jangka pendek dari

pendapatan pariwisata. Penerimaan pariwisata hanya dapat digunakan sebagai alat strategis untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan yang fokus pada pasar tenaga kerja dan pengembangan sumber daya manusia (Muchapondwa & Stage, 2013). Sebaliknya, Croes dan Rivera (2016) meneliti efek distribusi ekspansi pariwisata dengan menerapkan model SAM ke Ekuador dan menemukan bahwa pariwisata memiliki efek pengganda yang besar pada ekonomi dan berpotensi bermanfaat bagi orang miskin secara substansial. Meskipun, kekayaan hanya tersebar di semua rumah tangga di daerah perkotaan dan pedesaan dan lebih banyak menguntungkan mereka yang kaya.

Studi pada kelompok terakhir memperluas analisis SAM dengan menerapkan model *computable general equilibrium* (CGE) untuk menguji dampak ekonomi dan distribusi dari kegiatan pariwisata. Berbagai parameter dalam model dikalibrasi menggunakan SAM. Blake dkk. (2008) mengembangkan model CGE yang mempertimbangkan dampak perluasan pariwisata dan dampak distribusi antara rumah tangga kaya dan miskin dalam perekonomian Brasil. Mereka menunjukkan bahwa dampaknya terhadap semua kelompok pendapatan adalah positif, tetapi rumah tangga dengan pendapatan terendah menerima manfaat yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Pengentasan ketimpangan hanya akan efektif jika kebijakan pemerintah yang dapat mendistribusikan kembali bagian pendapatan yang lebih besar kepada masyarakat miskin juga dipertimbangkan.

Demikian pula di Thailand, peningkatan permintaan pariwisata inbound meningkatkan pendapatan rumah tangga secara agregat namun memperburuk distribusinya (Wattanakuljarus & Coxhead, 2008). Hal ini karena dampak dari ekspansi pariwisata hanya memperkuat sektor dengan pendapatan tinggi, seperti sektor non-pertanian, dan menghasilkan sebagian besar pendapatan dari sektor pariwisata. Akan tetapi penelitian ini masih belum membahas mengenai seberapa besar orang yang beralih dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Selain itu, terkait dengan perubahan kelas sosial akibat kehadiran sektor pariwisata juga belum dibahas dalam penelitian tersebut. Temuan bahwa pengurangan kemiskinan disertai dengan peningkatan ketimpangan pendapatan menggambarkan sulitnya *trade-off* dari peningkatan pariwisata. Sebuah studi CGE mengenai pariwisata domestik dan asing di Indonesia juga mengidentifikasi *trade-off* ini, karena kebijakan seperti investasi di sektor terkait pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Mahadevan et al., 2017).

## Metode

### Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diakses secara umum lewat laman Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Statistik Pariwisata DIY. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data tahunan dengan rentang waktu observasi data dari tahun 2014 hingga 2022. Data dari 5 kabupaten/kota serta data tahunan 2014-2022 menciptakan jumlah observasi

data penelitian yang berjumlah 45 dan dilambangkan dengan "N" pada tabel 1. Data mengenai kondisi perekonomian wilayah dan pendidikan menggunakan data dari Bappenas dan data mengenai pariwisata menggunakan publikasi dari Statistik Pariwisata DIY.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan yang diwakilkan dengan indeks GINI. Indeks GINI memiliki rentang dari 0 hingga 1, angka 0 menggambarkan terjadinya distribusi pendapatan yang setara dan angka 1 menggambarkan ketimpangan pendapatan yang sempurna. Kemudian, variabel independen pada penelitian ini adalah penerimaan pariwisata (PP). Penerimaan pemerintah dari sektor pariwisata sudah sering digunakan untuk menilai dampak pariwisata terhadap ketimpangan pendapatan (Oviedo-Garcia dkk., 2018; Nguyen dkk., 2021). Untuk menghitung efek pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah, variabel PDRB per kapita digunakan sebagai simbol dari tingkat pendapatan (Seetanah dkk., 2023; Wang & Tziamalis, 2023; Alam & Paramati, 2016). Inflasi digunakan untuk melihat penurunan daya beli masyarakat ketika harga semakin tinggi (Wang & Tziamalis, 2023) yang pada penelitian ini diformulasikan dengan *PDRB deflator*. Terakhir, untuk melihat perkembangan kualitas SDM, penelitian ini menggunakan rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai salah satu sektor yang dapat berpotensi dalam mengentaskan kemiskinan (Taufiq & Dartanto, 2020). Operasionalisasi variabel dapat dilihat pada bagian lampiran dan statistik deskriptif dari seluruh variabel dapat dilihat pada tabel 1. Semua variabel diubah menjadi bentuk *log* untuk menghadapi adanya *outlier* pada tiap-tiap variabel yang digunakan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

VARIABEL	N	MEAN	St. Dev	Min	Max
GINI	45	0,392	0,47	0,296	0,519
PP	45	18,118	2,725	14,749	28,343
RLS	45	9,419	1,629	6,450	11,890
INF	45	4,881	0,072	4,751	5,023
PDRB	45	3,489	0,518	2,851	4,723

Catatan: GINI: Indeks GINI; PP: Penerimaan Pariwisata; RLS: Rata-rata lama sekolah; INFLASI: Nilai inflasi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.

## Ekonometrika

Model dasar dari penelitian ini adalah penggunaan ekonometrika atau yang lebih dikenal dengan *ordinary least square* (OLS) untuk melihat dampak pariwisata terhadap ketimpangan pendapatan. Model dari OLS diformulasikan pada kalkulasi di bawah:

$$Pit = \beta + \beta PPit + \beta PDRBit + \beta RLSit + \beta INFit + \epsilon it \quad (1)$$

Dalam kalkulasi (1),  $Pit$  adalah indeks GINI kabupaten/kota  $i$  pada waktu ke-  $t$ . Kemudian  $\beta$  adalah nilai estimasi koefisien bagi variabel dependen. Lebih lanjut, secara berturut-turut diikuti oleh

variabel independen yaitu penerimaan pariwisata, PDRB per kapita, RLS dan tingkat inflasi pada provinsi  $i$  pada tahun ke  $t$ . Penambahan satu *dummy variable* independen dilakukan untuk melihat ketahanan parameter terhadap variabel dependen dengan formula:

$$P_{it} = \beta + \beta PP_{it} + \beta PDRB_{it} + \beta RLS_{it} + \beta INF_{it} + \beta CITY_{it} + \epsilon_{it} \quad (2)$$

Penambahan variabel CITY pada formula 2 merupakan lambang *dummy variabel* untuk Kota Yogyakarta sebagai *outlier* dengan indeks GINI dan penerimaan pariwisata tertinggi pada provinsi DIY. Pada uji ketahanan terakhir menggunakan model estimasi *generalized method of moment* (GMM). GMM dilakukan untuk menghindari permasalahan endogenitas atau hubungan dari variabel independen terhadap *error term* (Lynch & Brown, 2011). Kalkulasi GMM dilambangkan dengan:

$$\hat{\delta}(S^{-1}(W)) = \arg \min_{\delta} n g_n(\delta) S^{-1}(W) g_n(\delta) \quad (3)$$

## Hasil dan Pembahasan

Analisis diawali dengan menggunakan data panel yang dibubuhkan pada tabel 2 sebagai hasil analisis dasar. Tabel 2, membubuhkan hasil analisis data panel dengan pendekatan *pooling ordinary least square* (OLS), *time fixed effect*, *individual fixed effect* dan *two-ways fixed effect*. Hasil *F-test* dari memberikan hasil yang signifikan dengan *p-value* di bawah 0,05 pada pendekatan *individual* dan *two-ways* yang menunjukkan estimasi *fix effect* mengalahkan efisiensi perhitungan dari OLS. Selanjutnya uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (LM) dilaksanakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan *random effect* pada model regresi. Berdasarkan hasil estimasi yang dilaksanakan, uji LM menerima *null hypothesis* dimana hasil analisis memberikan nilai signifikan yang berada di atas 5% yang berarti keadaan ini menunjukkan estimasi OLS mengalahkan efisiensi dari perhitungan *random effect*. Kemudian, uji *Hausman* dilakukan untuk melihat ketahanan estimasi *fixed effect* lebih kuat ketimbang estimasi OLS. Uji *Hausman* menunjukkan bahwa estimasi *individual* dan *two-ways fixed* signifikan secara statistik sehingga pendekatan *fixed effect* lolos dalam uji ketahanan. Akhirnya, pendekatan *fixed effect* digunakan karena tidak terjadi perubahan parameter pada tiap-tiap pendekatan *fixed effect*.

Tabel 2. Hasil Analisis Dasar

VARIABEL	1	2	3	4
PP	0,005*** [0,002]	0,006*** [0,002]	0,007*** [0,002]	0,008*** [0,002]
RLS	0,028*** [0,004]	0,027*** [0,004]	0,072** [0,034]	0,084** [0,038]

INFLASI	0,001**	0,000	-0,001	-0,008
	[0,000]	[0,004]	[0,002]	[0,005]
PDRB	-0,032**	-0,035**	0,000	-0,078
	[0,013]	[0,017]	[0,087]	[0,128]
Waktu	TIDAK	YA	TIDAK	YA
Individu	TIDAK	TIDAK	YA	YA
Adj. R-Squared	0,748	0,725	0,307	0,190
Uji Hausman		6,112	10,248**	11,883***
Observasi	45	45	45	45

Catatan: \*, \*\*, \*\*\*, adalah *p-value* pada nilai 10%, 5% dan 1% secara berturut-turut. GINI: Indeks GINI; PP: Penerimaan Pariwisata; RLS: Rata-rata lama sekolah; INFLASI: Nilai inflasi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.

Hasil estimasi dari seluruh sampel yang ada dituangkan pada tabel 2. PP atau penerimaan pariwisata memberikan hasil estimasi koefisien yang positif dengan angka 0,008 dan signifikan secara statistik di bawah 1% pada seluruh model estimasi. Setiap 1% kenaikan dari pendapatan pariwisata pemerintah dapat meningkatkan indeks GINI atau ketimpangan pendapatan di DIY sebesar 0,008%. Estimasi ini memiliki daya tahan yang kuat dengan seluruh pendekatan memberikan parameter dan signifikansi yang identik. Nilai parameter PP berada pada rentang 0,005 hingga 0,008 pada tiap-tiap hasil estimasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendapatan industri pariwisata kepada pemerintah DIY menunjukkan dampak yang buruk secara statistik terhadap distribusi pendapatan di DIY, utamanya pada koridor indeks GINI. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas pariwisata dan ketimpangan pendapatan, dimana hipotesis *Kurnetz U-Curve* dapat dikatakan terjadi pada provinsi DIY. Alam & Paramati (2016) mendapatkan hasil yang identik dengan kajian mereka pada 49 negara berkembang dunia, pariwisata signifikan dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan pada negara-negara tersebut. Hasil estimasi tersebut juga cenderung konsisten hingga pada wilayah administratif yang lebih kecil seperti provinsi dan kabupaten/kota. Lee (2009) menemukan kota - kota di Amerika Serikat yang menjadikan pariwisata sebagai sektor utama pengembangan wilayah memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang kabupaten/kota yang tidak bergantung terhadap industri pariwisata.

Variabel lainnya yang menjadi pengendali pada perhitungan studi ini adalah RLS, Inflasi dan PDRB per kapita. RLS sebagai variabel yang digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di provinsi DIY memberikan parameter positif dan signifikan secara statistik pada rentang 0,028 hingga 0,084 dan memiliki *p-value* di bawah 5%. Hasil ini memberikan indikasi

bahwa setiap 1% kenaikan rata-rata lama sekolah di DIY, dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan atau indeks GINI pada rentang 0,028 hingga 0,084. Temuan ini merupakan sebuah keadaan tidak biasa dan jarang sekali ditemukan pada literatur akademis yang membahas ketimpangan pendapatan dan pendidikan. Keadaan ini dapat dijelaskan pada publikasi UNCTAD (2008) yang mengatakan bahwa alasan utama pertumbuhan ekonomi gagal memberikan perkembangan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat adalah tipe pengembangan wilayah yang digunakan sebuah wilayah itu sendiri. Pada sebagian besar wilayah berkembang, tipe pengembangan wilayah yang digunakan hanya menguntungkan sebagian kecil populasi. Penyerapan tenaga kerja tidak maksimal, pendapatan yang hanya terdistribusi pada desil pendapatan kelompok tinggi hingga tidak adanya jaring pengaman pendapatan bagi sebagian besar populasi.

Selanjutnya, beralih kepada variabel pengendali PDRB per kapita yang cenderung konsisten pada perhitungan OLS dan *fixed effect*. Parameter dan signifikansi PDRB per kapita secara statistik menunjukkan dampak yang baik dalam mengurangi ketimpangan pendapatan pada sebuah wilayah. Temuan ini akhirnya sejalan dengan konsensus dunia akademis yang mengatakan pertumbuhan PDRB dapat mengurangi ketimpangan pada sebuah wilayah. Terakhir adalah nilai inflasi yang positif dan signifikan pada estimasi OLS dan tidak signifikan pada estimasi *fixed effect*. Jika menggunakan estimasi OLS, maka peningkatan inflasi dapat membuat ketimpangan pendapatan semakin tinggi sebesar 0,01% pada setiap 1% peningkatan inflasi. Keadaan ini merupakan gambaran yang diharapkan dari inflasi karena setiap terjadinya inflasi masyarakat, terutama pendapatan pada desil rendah akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

### Uji Ketahanan

Berdasarkan sensitivitas dari estimasi, uji ketahanan dari temuan dilakukan dengan menggunakan dua alternatif, yaitu menambahkan *dummy variable* "Kota" untuk Kota Yogyakarta. Model analisis alternatif dengan pendekatan *Generalized Method of Moments* (GMM) yang secara berturut-turut dituangkan dalam tabel 3 dan 4. Pertama, "Kota" dimasukkan sebagai *dummy variable* karena pusat pertumbuhan pariwisata dan nilai tertinggi penerimaan pariwisata berada di Kota Yogyakarta. Wilayah ini juga memiliki indeks GINI tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi DIY. Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi yang konsisten dalam tiap-tiap parameter analisis. Penerimaan pariwisata pada seluruh pendekatan baik OLS maupun *fixed effect* memberikan hasil yang konsisten dengan hasil statistik signifikan yang dapat memperburuk ketimpangan pendapatan di provinsi DIY. Parameter tersebut berada pada rentang 0,007 hingga 0,009 dan signifikan dengan *p-value* di bawah 1% pada seluruh model estimasi. Kemudian, RLS terbukti signifikan secara statistik dalam meningkatkan ketimpangan. Terakhir, PDRB per kapita memiliki ketahanan yang kuat terhadap perubahan variabel dengan terbuktinya signifikan tidak hanya pada estimasi OLS tetapi juga di *time fixed effect*. Variabel terbaru estimasi adalah penggunaan *dummy variable* "Kota" terbukti signifikan dalam meningkatkan ketimpangan

pendapatan. Keadaan ini menunjukkan memiliki wilayah dengan konsentrasi pertumbuhan ekonomi pariwisata tertinggi di DIY dapat membuat ketimpangan pendapatan semakin besar. Namun, masih terdapat satu variabel yang perlu dilihat kembali dan diestimasi karena terjadi perubahan parameter pada OLS dan *fixed effect*, yaitu pertumbuhan inflasi. Guna menilik hasil tersebut, analisis lanjutan dengan pendekatan GMM pada tabel 4 dilakukan.

Tabel 3. Uji Ketahanan. Alternatif pengukuran menggunakan *Dummy Variable* Kota Yogyakarta

VARIABEL	1	2	3	4
PP	0,007*** [0,002]	0,009*** [0,002]	0,007*** [0,002]	0,007*** [0,002]
CITY	0,084*** [0,030]	0,119*** [0,033]		
RLS	0,035*** [0,004]	0,034*** [0,004]	0,063* [0,034]	0,086** [0,038]
INFLASI	0,290*** [0,080]	-0,540 [0,486]	-0,210 [0,292]	-1,263* [0,714]
PDRB	-0,119*** [0,033]	-0,177*** [0,042]	-0,036 [0,095]	-0,057 [0,128]
Waktu	TIDAK	YA	TIDAK	YA
Individu	TIDAK	TIDAK	YA	YA
Adj. R-Squared	0,786	0,802	0,301	0,198
Uji Hausman		48,594***	1,307	11,6**
Observasi	45	45	45	45

Catatan: \*, \*\*, \*\*\*, adalah *p-value* pada nilai 10%, 5% dan 1% secara berturut-turut. GINI: Indeks GINI; PP: Penerimaan Pariwisata; RLS: Rata-rata lama sekolah; INFLASI: Nilai inflasi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto per Kapita; CITY: *Dummy variable* untuk Kota Yogyakarta.

Tabel 4 mengestimasi regresi dengan model *two-step* GMM untuk memberikan komparasi dari uji ketahanan. Model ini digunakan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya endogenitas pada variabel independen terhadap *error term* yang acap kali terjadi pada penggunaan data panel. Zhao & Xia (2019) mengatakan model GMM dapat lebih efisien dalam memberikan hasil estimasi terutama pada penggunaan *fixed effect*. Hasil uji *hansen* memberikan hasil yang tidak signifikan dimana *null hypothesis* dinyatakan diterima dan mengindikasikan bahwa model yang

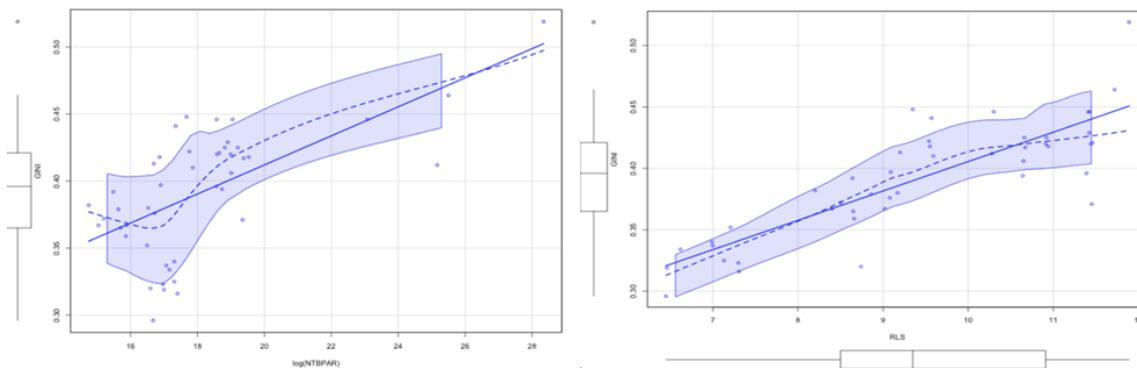
diestimasi tidak memiliki permasalahan penggunaan instrumen variabel, tidak berkorelasi dengan *error term* serta variabel yang tidak perlu digunakan telah dieliminasi. Hal tersebut didukung dengan temuan dari hasil uji *Arrelano-Bond II* yang tidak signifikan dan mengindikasikan tidak terjadi endogenitas pada variabel independen. Selanjutnya, kembali kepada uji ketahanan pada estimasi yang dilaksanakan, menunjukkan konsistensi pada parameter penerimaan pariwisata, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pariwisata, pendidikan hingga inflasi secara konsisten dan dapat dikatakan secara signifikan dalam memperparah ketimpangan pendapatan di provinsi DIY. Sedangkan, PDRB per kapita secara konsisten pada parameter dan ukuran signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan pada seluruh model estimasi.

Hasil yang ditemukan pada dua pendekatan yang berbeda untuk melihat sensitivitas parameter dapat dikatakan memiliki ketahanan yang kuat dan mendukung basis temuan pada tabel 2. Berdasarkan hasil tersebut, temuan utama penelitian ini dapat dikatakan kuat pada penambahan variabel dan model estimasi. 4. Terakhir, untuk memberikan gambaran serta interpretasi yang lebih mendalam mengenai parameter positif penerimaan pariwisata dan pendidikan terhadap indeks GINI, gambar 1 dibubuhkan. Terlihat bahwa *scatterplot* yang ada menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai penerimaan pariwisata dan rata-rata lama pendidikan sejalan dan konsisten dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan di provinsi DIY. Hasil regresi dan *scatterplot* ini sejalan dengan parameter yang ada pada parameter yang diberikan sehingga tidak terjadi keanehan pada model estimasi.

Tabel 4. Uji Ketahanan. Model Alternatif: *Two-step GMM*

VARIABEL	Efek
PP	0,011*** [0,003]
RLS	0,070*** [0,021]
INFLASI	0,002*** [0,001]
PDRB	-0,216** [0,093]
<i>p-value</i> Uji Hansen	1
<i>p-value</i> Uji AR II	0,196
Observasi	45

Catatan: \*, \*\*, \*\*\*, adalah *p-value* pada nilai 10%, 5% dan 1% secara berturut-turut. GINI: Indeks GINI; PP: Penerimaan Pariwisata; RLS: Rata-rata lama sekolah; INFLASI: Nilai inflasi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.



Gambar 1. Scatterplot dari penerimaan pariwisata (PP) dan rata-rata lama sekolah (RLS) terhadap indeks GINI pada seluruh kabupaten/kota di provinsi DIY.

### Diskusi

Pertumbuhan pariwisata seringkali diasosiasikan pada pertumbuhan ekonomi, diversifikasi pendapatan hingga penurunan ketimpangan pendapatan (Alam & Paramati, 2016). Namun, temuan-temuan sebelumnya belum dapat mencapai konsensus bahwa pariwisata dapat mengurangi ketimpangan pendapatan (Zhang, 2021). Studi ini kemudian memberikan kontribusinya pada arena riset yang membahas pariwisata dan ketimpangan pendapatan. Studi ini memberikan temuan bahwa peningkatan penerimaan pariwisata yang terjadi pada sebuah wilayah, utamanya di provinsi DIY berkontribusi signifikan secara statistik dalam peningkatan ketimpangan pendapatan pada sebuah wilayah. Temuan ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang mengatakan bahwa pariwisata meningkatkan ketimpangan pendapatan pada sebuah wilayah (Lee, 2009; Oviedo-Garcia dkk., 2019).

Temuan mengenai peningkatan penerimaan pariwisata yang kemudian berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan merupakan sebuah temuan yang menarik. Nguyen dkk., (2020) mengatakan bahwa negara yang memiliki pendapatan rendah atau berkembang cenderung memiliki dampak pengembangan industri pariwisata yang berdampak buruk terhadap ketimpangan pendapatan. Pada sisi lain, keadaan ini juga dapat terjadi dengan masyarakat lokal yang tidak dapat bersaing secara adil dengan pengusaha besar dalam koridor pariwisata yang membuat pasar pariwisata diakuisi dan membuat mereka tertinggal dalam kompetisi di industri ini (Lee, 2009). Argumentasi tersebut kemudian didukung oleh Alam & Paramati (2016) yang mengatakan jenis industri pariwisata di negara berkembang biasanya berbentuk oligopolistik yang diakuisi oleh desil pendapatan tingkat tinggi. Keadaan ini perlu digaris bawahi oleh pemerintah daerah provinsi DIY karena peningkatan penerimaan pariwisata dapat memperburuk kondisi distribusi pendapatan di provinsi ini. Seetana dkk., (2023) mengadvokasikan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan konsep *pro-poor tourism* dalam menghadapi permasalahan ketimpangan pendapatan pada sebuah wilayah. Perencanaan yang didesain dengan matang dan memperhatikan lingkungan lokal seperti aspek partisipatoris serta berkomitmen kepada seluruh pemangku kepentingan menjadi sebuah hal yang penting (Ashley dkk., 2000). Pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengenalkan wilayah-

wilayah perdesaaan kepada calon wisatawan (Li dkk., 2016). Lebih lanjut, infrastruktur yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah-wilayah perdesaaan perlu ditingkatkan untuk mendukung perjalanan wisatawan ke wilayah-wilayah tersebut.

Melihat literatur-literatur sebelumnya dan kondisi provinsi DIY sekarang, secara umum DIY dapat dikatakan pada fase *Inverted U-Curve* atau mendukung hipotesis *Kurnetz U-Curve*. Kondisi tersebut berdasarkan temuan pada fenomena ketimpangan pendapatan dan sektor pariwisata. Penting untuk pemerintah provinsi DIY agar melihat secara lebih mendalam permasalahan ini untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang mungkin saja timbul akibat dari proses pengembangan, seperti yang dikatakan Deiwiks dkk., (2012), Buhaug dkk., (2012) dan Lessmann (2013) dalam Lessmann (2014). Pemerintah perlu mengkaji ketimpangan yang terjadi agar nantinya ketidaktahuan ambang batas ketimpangan (Lessmann, 2014), dapat diantisipasi.

Secara umum, terdapat sebuah pola yang ditemukan dari studi-studi sebelumnya tentang bagaimana mengatasi ketimpangan ini. Gennaioli dkk, (2012) mengatakan bahwa cara terbaik yang dapat dilakukan pemerintah untuk keluar dari permasalahan ini adalah berinvestasi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga berdampak baik dan terbukti dapat menjadi jalan keluar pada negara Perancis untuk mengakhiri aglomerasi pertumbuhan (Combes dkk., 2011). Niranjan (2010) juga mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang seimbang pada setiap wilayahnya juga dapat membantu wilayah untuk keluar dari permasalahan ketimpangan regional. Namun, berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, peningkatan rata-rata lama sekolah bagi penduduk asli DIY memiliki parameter positif terhadap ketimpangan. Penjelasan terbaik dari permasalahan ini adalah perginya penduduk provinsi DIY setelah melaksanakan pendidikan ke wilayah lain. Pemerintah provinsi DIY juga perlu mempertimbangkan kebijakan perihal bagaimana tiap-tiap SDM yang telah menyelesaikan pendidikannya tetap berada di DIY dan tidak melakukan migrasi ke wilayah lain.

## Kesimpulan

Studi “Apakah Pariwisata Mempengaruhi Ketimpangan? Bukti dari Daerah Istimewa Yogyakarta” melihat dampak industri pariwisata terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi DIY. Analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda yang dilanjutkan dengan penggunaan *time*, *individual* dan *two-ways fixed effect* secara berturut-turut. Kemudian, uji ketahanan parameter terhadap seluruh variabel independen dilaksanakan dengan menggunakan set variabel independen dan model analisis yang berbeda pada 5 kabupaten/kota di provinsi DIY pada rentang waktu 2014-2022. Hasil temuan penelitian menemukan bahwa pertumbuhan penerimaan pariwisata memberikan dampak statistik yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di DIY. Signifikansi tersebut memberikan indikasi yang buruk terhadap ketimpangan. Peningkatan pendapatan pariwisata diindikasikan dapat memperparah ketimpangan pendapatan. Hasil estimasi variabel pariwisata mengindikasikan penerimaan pariwisata hanya tersalurkan ke desil pendapatan tinggi dan belum terdistribusikan dengan baik kepada penduduk yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Temuan lain juga nampak dari studi ini pada koridor pendidikan

yang diwakilkan oleh indikator rata-rata lama sekolah. Parameter dari variabel pendidikan signifikan dalam meningkatkan angka ketimpangan pendapatan di provinsi DIY sejalan dengan temuan pada variabel pariwisata. Hasil estimasi dari studi ini telah melewati uji ketahanan dan dapat dikatakan konsisten pada setiap parameter estimasi.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi DIY merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dari proses pengembangan dari wilayah yang awalnya mengandalkan sektor informal dan menuju sektor formal dalam aspek ketenagakerjaan. Fenomena ketimpangan pendapatan di provinsi DIY masih memiliki perjalanan yang panjang. Hal tersebut berlandaskan publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY yang menyatakan persentase jumlah pekerja informal di DIY masih berada di angka 55,36%. Angka tersebut menunjukkan setengah populasi tenaga kerja di DIY belum memiliki pendapatan yang pasti karena bekerja di sektor informal. Pemerintah DIY perlu melakukan penanggulangan fenomena ini agar ketimpangan pendapatan tidak semakin tinggi dan diharapkan tidak menyebabkan permasalahan yang merambat pada sektor lain.

## Daftar Pustaka

- Akkemik, K. A. (2012). Assessing the importance of international tourism for the Turkish economy: A social accounting matrix analysis. *Tourism Management*, 33, 790–801.
- Alam, M. S., & Paramati, S. R. (2016). The impact of tourism on income inequality in developing economies: Does Kuznets curve hypothesis exist? *Annals of Tourism Research*, 61, 111–126. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.09.008>
- Ateljevic, I., Pritchard, A., & Morgan, N. (2007). *The Critical Turn in Tourism Studies: Innovative Research Methodologies*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-045098-8.50006-4>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Berita Resmi Statistik: Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta. Diakses dari <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/1340/tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-d-i--yogyakarta--maret-2023.html>
- Bappeda DIY. (2024). Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses dari [https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/603-data-kinerja-dinas-pariwisata](https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/603-data-kinerja-dinas-pariwisata)
- Bappeda DIY. (2024). Jumlah Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses dari [https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/603-data-kinerja-dinas-pariwisata](https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/603-data-kinerja-dinas-pariwisata)
- Blake, A. (2008). Tourism and income distribution in East Africa. *International Journal of Tourism Research*, 10, 511–524.

- Buhaug, H., Gleditsch, K. S., Holtermann, H., Østby, G., & Tollefsen, A. F. (2011). It's the local economy, stupid! Geographic wealth dispersion and conflict outbreak location. *Journal of Conflict Resolution*, 55(5), 814–840. <https://doi.org/10.1177/0022002711408011>
- Carrascal Incera, A., & Fernandez, M. F. (2015). Tourism and income distribution: Evidence from a developed regional economy. *Tourism Management*, 48, 11–20.
- Combes, P., Lafourcade, M., Thisse, J., & Toutain, J. (2011). The rise and fall of spatial inequalities in France: A long-run perspective. *Explorations in Economic History*, 48(2), 243–271. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2010.12.004>
- Cole, S., & Morgan, N. (2011). Introduction: Tourism and inequalities. In *Tourism and inequality: Problems and prospects* (pp. xvii–xxxv). CABI. 2010.
- Croes, R., & Vanegas, M. (2008). Cointegration and causality between tourism and poverty reduction. *Journal of Travel Research*, 47, 94–103.
- Croes, R., & Rivera, M. A. (2016b). Tourism's potential to benefit the poor: A social accounting matrix model applied to Ecuador. *Tourism Economics*, 23, 29–48
- Deiwiks, C., Cederman, L., & Gleditsch, K. S. (2012). Inequality and conflict in federations. *Journal of Peace Research*, 49(2), 289–304. <https://doi.org/10.1177/0022343311431754>
- Dinas Pariwisata DIY. (2022). Statistik Kepariwisata DIY Tahun 2022. <https://visitingjogja.jogjaprovo.go.id/webdinas/statistik-pariwisata/>
- Garsous, G., Corderi, D., Velasco, M., & Colombo, A. (2017). Tax incentives and job creation in the tourism sector of Brazil's SUDENE area. *World Development*, 96, 87–101.
- Gennaioli, N., La Porta, R., López-De-Silanes, F., & Shleifer, A. (2012). Human Capital and Regional Development \*. *The Quarterly Journal of Economics*, 128(1), 105–164. <https://doi.org/10.1093/qje/qjs050>
- Ghosh, S., & Mitra, S. K. (2021). Tourism and inequality: A relook on the Kuznets curve. *Tourism Management*, 83, 104255. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104255>
- Helpman, E., Itskhoki, O., & Redding, S. (2010). Inequality and unemployment in a global economy. *Econometrica*, 78, 1239–1283.
- Hoover, K. D. (2017). Causality in economics and econometrics. In M. Vernengo, E. P. Caldentey, & B. J. Rosser Jr (Eds.), *The new Palgrave dictionary of economics* (pp. 1–13). London: Palgrave Macmillan UK.
- Keneck-Massil, J., Nomo-Beyala, C. & Owoundi, F. (2021), “*The corruption and income inequality puzzle: does political power distribution matter?*”, *Economic Modelling*, Vol. 103, 105610.
- Kim, N., Song, H., & Pyun, J. H. (2016). The relationship among tourism, poverty, and economic development in developing countries. *Tourism Economics*, 22, 1174–1190.

- Kinyondo, A., & Pelizzo, R. (2015). Tourism, development and inequality- the case of Tanzania. *Poverty & Public Policy*, 7, 64–79.
- Kyara, V. C., Rahman, M. M., & Khanam, R. (2021). Tourism expansion and economic growth in Tanzania: A causality analysis. *Heliyon*, 7, Article e06966. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06966>
- Lee, S. K. (2009). Income inequality in tourism services-dependent counties. *Current Issues in Tourism*, 12(1), 33–45. <https://doi.org/10.1080/13683500802248001>
- Lee, S., & O’Leary, J. T. (2008). Determinants of income inequality in U.S. nonmetropolitan tourism- and recreation-dependent communities. *Journal of Travel Research*, 46, 456–468.
- Lessmann, C. (2013). Regional inequality and internal conflict. Social Science Research Network. [https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN\\_ID2221846\\_code459177.pdf?abstractid=2221846&mirid=1](https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2221846_code459177.pdf?abstractid=2221846&mirid=1)
- Lessmann, C. (2014). Spatial inequality and development — Is there an inverted-U relationship? *Journal of Development Economics*, 106, 35–51. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.08.011>
- Li, H., Chen, J. L., Li, G., & Goh, C. (2016). Tourism and regional income inequality: Evidence from China. *Annals of Tourism Research*, 58, 81–99. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.02.001>
- Mahadevan, R., Amir, H., & Nugroho, A. (2017). How pro-poor and income-equitable are tourism taxation policies in a developing country? Evidence from a computable general equilibrium model. *Journal of Travel Research*, 56(3), 334–346.
- Muchapondwa, E., & Stage, J. (2013). The economic impacts of tourism in Botswana, Namibia and South Africa: Is poverty subsiding? *Natural Resources Forum*, 37, 80–89.
- Nguyen, C. P., Schinckus, C., Su, T. D., & Chong, F. H. L. (2021). The influence of tourism on income inequality. *Journal of Travel Research*, 60, 1426–1444
- Nguyen, D. T. N., D’Hautesserre, A., & Serrao-Neumann, S. (2021). Intrinsic barriers to and opportunities for community empowerment in community-based tourism development in Thai Nguyen province, Vietnam. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(4), 723–741. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1884689>
- Niranjan, R. (2020). Spatial inequality in human development in India- A case study of Karnataka. *Sustainable Futures*, 2, 100024. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2020.100024>
- Njoya, E. T., & Seetaram, N. (2018a). Tourism contribution to poverty alleviation in Kenya: A dynamic computable general equilibrium analysis. *Journal of Travel Research*, 57, 513–524.
- Oviedo-Garcia, M. A., Gonzalez-Rodriguez, M. R., & Vega-Vazquez, M. (2018). Does Sun-and-Sea All-Inclusive Tourism Contribute to Poverty Alleviation and/or Income Inequality

- Reduction? The Case of the Dominican Republic. *Journal of Travel Research*, 00(0), 1-19. doi: 10.1177/0047287518789272
- Raza, S. A., & Shah, N. (2017). Tourism growth and income inequality: does Kuznets Curve hypothesis exist in top tourist arrival countries. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 22, 1–11. <https://doi.org/10.1080/10941665.2017.1343742>
- Ren, C., Pritchard, A. & Morgan, N (2007). In press. Constructing tourism research: A critical enquiry. *Annals of Tourism Research*.
- Scheyvens, R. (2007). Exploring the Tourism-Poverty Nexus. *Current Issues in Tourism*, 10, 231-254. <https://doi.org/10.2167/cit318.0>
- Schilcher, D. (2007). Growth Versus Equity: The Continuum of Pro-Poor Tourism and Neoliberal Governance. *Current Issues in Tourism*, 10(2–3), 166–193. <https://doi.org/10.2167/cit304.0>
- Seetanah, B., Gopy-Ramdhan, N., & Bhattu-Babajee, R. (2023). Can tourism curb income inequality? Tourism Agenda 2030. *Tourism Review*, 78(2), 646–664. <https://doi.org/10.1108/tr-02-2022-0094>
- UNCTAD. (2008). Despite rapid economic growth, number of poor still rising in Least Developed Countries, Report warns. <https://unctad.org/press-material/despite-rapid-economic-growth-number-poor-still-rising-least-developed-countries>
- Wang, Y., & Tziamalis, A. (2023). International tourism and income inequality: The role of economic and financial development. *Tourism Economics*, 29(7), 1836–1864. <https://doi.org/10.1177/13548166231177106>
- Wattanakuljarus, A., & Coxhead, I. (2008). Is tourism-based development good for the poor? *Journal of Policy Modeling*, 30, 929–955.
- World Bank. (2017). Distributions in motion: economic growth, inequality, and poverty dynamics. Policy Research Working Paper Series 5424, The World Bank. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3908>
- Yang, Y., Fik, T. J., & Zhang, H. (2017). Designing a Tourism Spillover Index Based on Multidestination Travel: A Two-Stage Distance-Based Modeling Approach. *Journal of Travel Research*, 56(3), 317-333. <https://doi.org/10.1177/0047287516641782>
- Zhang, J. (2021). The effects of tourism on income inequality: A meta-analysis of econometrics studies. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 48, 312–321. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.07.009>
- Zhao, L., & Xia, X. (2019). Tourism and poverty reduction: Empirical evidence from China. *Tourism Economics*. doi: 10.1177/1354816619863266.